



BPPPE

BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM

LAPORAN KINERJA 2021

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN
DAN PEMULIHAN EKOSISTEM



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2021 merupakan laporan hasil pencapaian kinerja Direktorat BPPE selama tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pembinaan konservasi ekosistem esensial yang memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi dan Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya.

Selanjutnya kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Plt. Direktur BPPE,



Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc



DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Organisasi, Isu strategis

7

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis, , Rencana Kerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021

15

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran

39

PENUTUP

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BPPE 2021

KENDALA

- Penghematan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Masih ada pemahaman yang kurang mengenai implementasi Perdirjen No. 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang juknis inver di luar KK
- Tantangan dalam pengumpulan data dari stakeholder terkait kegiatan inventarisasi, mengingat areal inventarisasi dilaksanakan pada bentang alam lansekap yang beragam termasuk administrasi pengelolaannya (Hutan dan APL)

11

Unit KEE
dari target 11 unit KEE

Jumlah Kawasan Ekosistem
Esensial yang ditingkatkan
efektivitas pengelolaannya

100 %

REALISASI
KINERJA

94,66%

8,932

Juta Hektar
dari target 10 Juta Ha

Luas kawasan yang diinventarisasi dan
diverifikasi dengan nilai keanekaragaman
hayati tinggi secara partisipatif di luar
Kawasan Konservasi

89,32 %

TINDAK LANJUT

- Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPT dan para pihak baik secara tatap muka maupun daring
- kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terutama Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat mitra KSDAE dan pemilik/pengelolaan kawasan.
- Menghimpun data dan informasi terkait yang berasal dari instansi/ lembaga lain maupun mitra yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK ini

REALISASI



Rp. 1.595.626.194

99,82 %

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Direktorat BPPE) berubah nomenklatur menjadi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE).

Dengan adanya perubahan ini membuat tugas dan fungsi organisasi juga berubah. Namun demikian, dalam masa transisi hingga akhir tahun 2021, kegiatan yang dilakukan masih dalam tugas dan fungsi organisasi sebelumnya

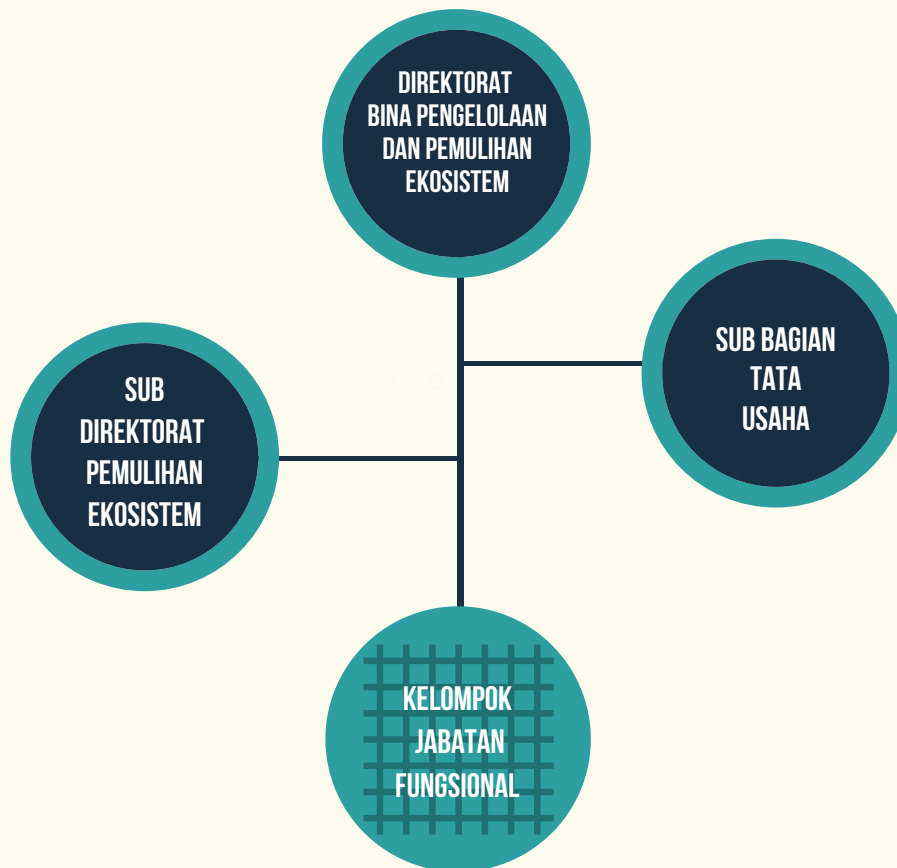
Laporan Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2021 merupakan laporan hasil pencapaian kinerja Direktorat BPPE selama tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Direktorat BPPE dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPPE tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPPE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPPE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

A. Organisasi

Pada saat ini Direktorat BPPE sedang melakukan penataan pegawai sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021 sehingga di awal 2022 sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi Direktorat yang baru. Struktur organisasi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem digambarkan pada bagan di samping



PROFIL SDM DIREKTORAT BPPE

STATUS KEPEGAWAIAN

27 PNS

1 CPNS

8 PPNPM

PENDIDIKAN

1 S3

10 S2

17 S1

5 D3

3 SMA



JABATAN

2 STRUKTURAL

4 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

5 PEH MUDA

2 PEH PERTAMA

1 ARSIPARIS MUDA

1 BENDAHARA

2 PRANATA KOMPUTER PERTAMA

6 ANALIS DATA

1 PENATA ADMINISTRASI KEUANGAN

1 VERIFIKATOR KEUANGAN

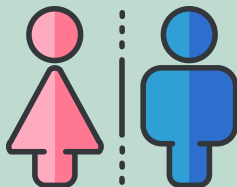
1 PENATA USAHA UMUM

1 CARAKA

8 PPNPM

1 PNS DIPERBANTUKAN

36



JENIS KELAMIN

17 LAKI LAKI

19 PEREMPUAN

Tugas Pokok Direktorat BPPE yaitu

01

Penyiapan perumusan kebijakan

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

02

Pelaksanaan Kebijakan

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

03

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

04

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

05

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

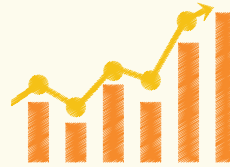
06

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;



Meningkatkan ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi.



Meningkatkan efektivitas pengelolaan KEE untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya



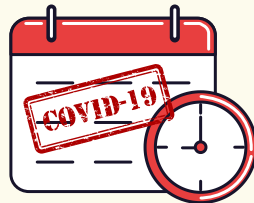
Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam rangka membangun kesepahaman pengelolaan KEE dengan mengadopsi prinsip pokok konservasi.

ISU STRATEGIS

Internalisasi kebijakan KEE dalam perencanaan tata ruang nasional maupun daerah.



penyesuaian waktu dan metode pelaksanaan kegiatan Direktorat BPPE di era Pandemi Covid 19



Refocusing anggaran sebesar Rp. 2.038.908.000,- menjadi Rp1.598.508.000,-.



terdapat penyesuaian struktur organisasi Direktorat BPPE dari 2 (dua) Subdirektorat menjadi 1 (satu) Subdirektorat yaitu Subdirektorat Pemulihan Ekosistem.



A photograph of a lush, green forest landscape. The scene is filled with dense foliage, including various types of trees and thick undergrowth. A large, prominent tree with a wide, spreading canopy is the central focus. The forest is shrouded in a light mist or fog, which adds a sense of depth and atmosphere. The overall color palette is dominated by various shades of green, with some brown tones visible in the tree trunks and branches.

Taman Kehati Kabupaten Belitung,
Bangka Belitung
Foto : DLH Kab Belitung

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Pada Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat BPPE Tahun 2021 berpedoman pada dokumen perencanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat BPPE Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Direktur BPPE Tahun 2021 yang memuat kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati yang berada di luar kawasan konservasi. Sasaran kegiatan Direktorat BPPE yaitu:

1 Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi

dengan indikator :Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (**43 Juta Hektar**)

dengan pembagian target tiap tahun sebagai berikut

No	Tahun	Target
1	2020	8 Juta Ha
2	2021	10 Juta Ha
3	2022	10 Juta Ha
4	2023	10 Juta Ha
5	2024	5 Juta Ha

2 Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif

dengan indikator : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (**55 Unit KEE**).

dengan pembagian target tiap tahun sebagai berikut

No	Tahun	Target
1	2020	11 unit KEE
2	2021	11 unit KEE
3	2022	11 unit KEE
4	2023	11 unit KEE
5	2024	11 unit KEE

Kedua target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

B. Rencana Kerja Tahun 2021

Mulai Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial masuk ke dalam klaster Program Kualitas Lingkungan Hidup (KLH).

Kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK Direktorat BPPE dilaksanakan oleh Kementerian KLHK Pusat (Dit BPPE) dengan dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE, dalam hal ini UPT Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam. selain itu kegiatan ini juga melibatkan stakeholder terkait antara lain pemerintah daerah, akademisi, LSM dan pihak swasta

No	Program	Sasaran Program
1	Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive, dan berpelayanan prima
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati 2.Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar 3..Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari 4.Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 5.Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi

No	UPT PENANGGUNG JAWAB	PROVINSI	TARGET (Ha)
1	BKSDA Aceh	Aceh	393.333
2	BBKSDA Sumatera Utara	Sumatera Utara	283.568
3	BKSDA Sumatera Barat	Sumatera Barat	156.507
4	BBKSDA Riau	Riau	711.502
		Kepulauan Riau	
5	BKSDA Bengkulu	Bengkulu	156.820
		Lampung	
6	BKSDA Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	351.922
		Bangka Belitung	
7	BKSDA Jambi	Jambi	145.482
8	BKSDA Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1271.937
9	BKSDA Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	35.141
10	BKSDA Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	935.663
11	BKSDA Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1.749.602
		Kalimantan Utara	
12	BKSDA Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	185.767
13	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	3.544
24	BKSDA Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	502.112
		Sulawesi barat	
15	BKSDA Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	389.247
16	BKSDA Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	64.510
17		Gorontalo	
18	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	225.725
19	BKSDA Maluku	Maluku	197.802
		Maluku Utara	
20	BBKSDA Papua	Papua	1.767.713
21	BKSDA Papua Barat	Papua Barat	508.828
	Jumlah Luasan target (Ha)		10.037.425

Lokasi Target kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas

**10
Juta Ha**

No	UPT PENANGGUNG JAWAB	TIPOLOGI	LOKASI	UPT PENANGGUNG JAWAB
1	KEE Mangrove Ujung Pangkah	Lahan Basah	Kab Gresik, Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur
2	KEE Mangrove Torosiaje	Lahan Basah	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara
3	Taman Kehati Jombang	Taman Kehati	Kab Jombang, Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur
4	Taman Kehati Kiara Payung	Taman Kehati	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
5	Taman Kehati Kabupaten Kuningan	Taman Kehati	Kab Kuningan, Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
6	Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	Karst	Kab Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah
7	Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea Kelay	Koridor	Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur	BKSDA Kalimantan Timur
8	Koridor Gajah Lansekap Seblat	Koridor	Bengkulu	BKSDA Bengkulu
9	ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	ABKT	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalimantan Tengah
10	ABKT Rote Ndao	ABKT	Kab Rote Ndao, NTT	BBKSDA NTT
11	ABKT Pantai Kili kili	ABKT	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur

**Kawasan
Ekosistem
Esensial yang
ditingkatkan
Efektivitas
Pengelolaannya
sebanyak**

**11
Unit KEE**

ALOKASI ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL TAHUN 2021

No	Output Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)
1	Kebijakan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.120.075.000
2	Kebijakan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2 Rekomendasi Kebijakan	2.266.750.000

Koridor Gajah, Seblat, Bengkulu
Foto : BKSDA Bengkulu-Lampung



PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT BPPE TAHUN 2021

IKK

1

SASARAN KEGIATAN

Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

**10
Juta Ha**

2

SASARAN KEGIATAN

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

**11
Unit KEE**



Danau Tendetung, Kawasan Karst Kabupaten
Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
Foto : Dispar Kab Banggai Kepulauan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja pada Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial. Pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat BPPE dihitung berdasarkan capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 antara Direktur BPPE dengan Direktur Jenderal KSDAE.



Mangrove Ujung Pangkah, Kab Gresik,
Jawa Timur

III.1.1. Capaian Kinerja tahun 2021

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan diperoleh dari rerata capaian IKK. Berdasarkan perhitungan rerata capaian 2 (dua) IKK tahun 2021, capaian kinerja Direktorat BPPE sebesar 94,66%, dimana pada capaian IKK 1 tercapai 89,32 %, dan pada IKK 2 tercapai 100%,

8,932

**Juta Hektar
dari target 10 Juta Ha**

Luas kawasan yang diinventarisasi
dan diverifikasi dengan nilai
keanekaragaman hayati tinggi
secara partisipatif di luar Kawasan
Konservasi

89,32 %

11

**Unit KEE
dari target 11 unit KEE**

Jumlah Kawasan Ekosistem
Esensial yang ditingkatkan
efektivitas pengelolaannya

100 %



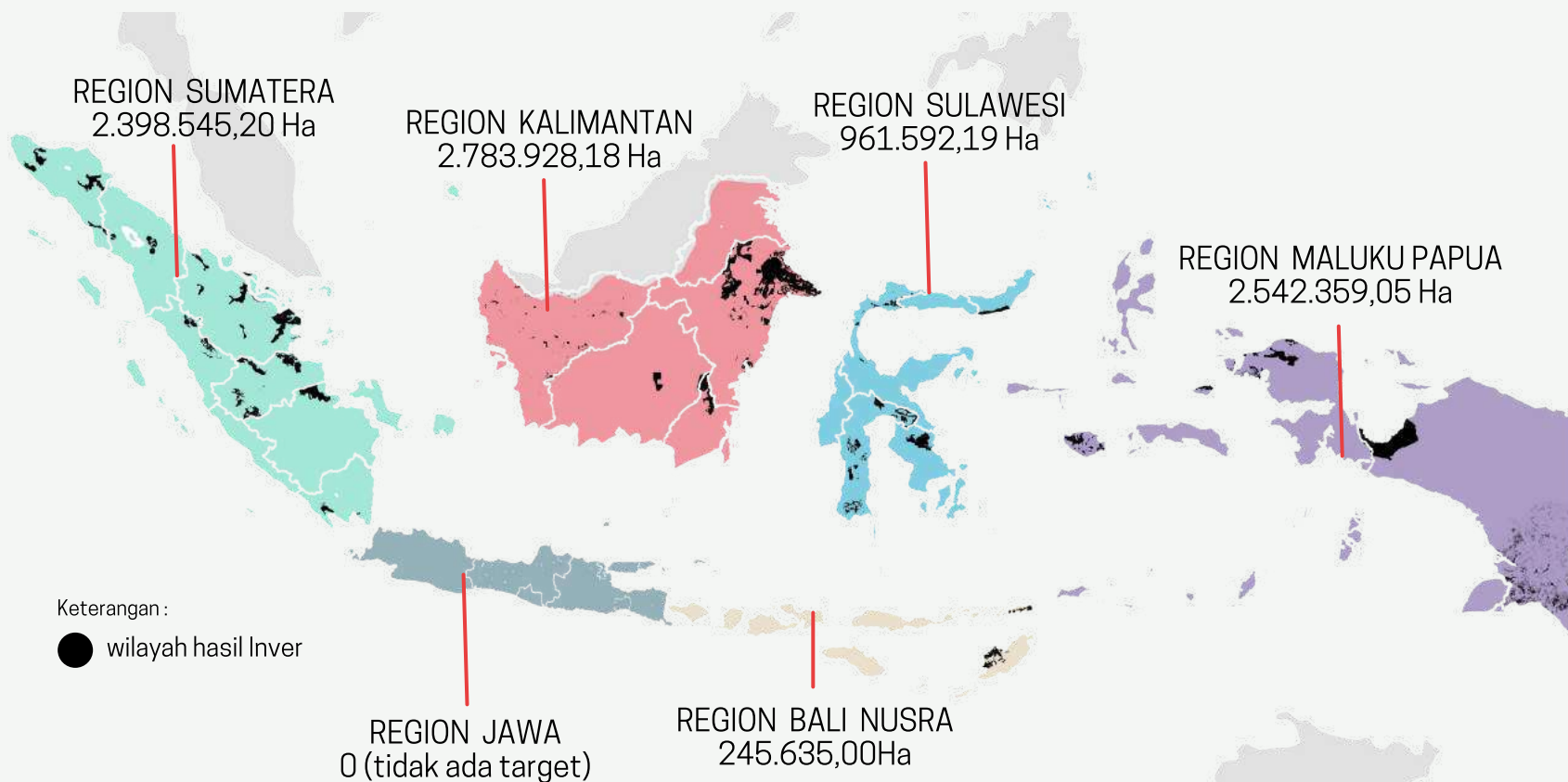
IKK 1 : Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

No	UPT PENANGGUNG JAWAB	PROVINSI	TARGET (Ha)	CAPAIAN (Ha)	KETERANGAN LOKASI (KABUPATEN)
1	BKSDA Aceh	Aceh	393.333	414.469,53	Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Pidie, Pidie Jaya
2	BBKSDA Sumatera Utara	Sumatera Utara	283.568	115.228,49	Asahan, Pakpak Barat, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara dan Selatan, Toba samosir
3	BKSDA Sumatera Barat	Sumatera Barat	156.507	208.967,25	Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Sijunjung, Tanah Datar, Solok,
4	BBKSDA Riau	Riau	711.502	756.596,26	Bengkalis, Indragiri Hulu dan Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu dan Hilir, Siak
		Kepulauan Riau			
5	BKSDA Bengkulu	Bengkulu	156.820	63.842,08	Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus
		Lampung			
6	BKSDA Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	351.922	264.105,67	Banyuasin, Musi Banyuasin
		Bangka Belitung			
7	BKSDA Jambi	Jambi	145.482	575.335,92	erangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo
8	BKSDA Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1271.937	101.903,82	Kapuas
9	BKSDA Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	35.141	333.556,89	Balangan, Tabalong
10	BKSDA Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	935.663	146.263,06	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Malawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
11	BKSDA Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1.749.602	1.749.602	Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara
		Kalimantan Utara			
12	BKSDA Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	185.767	241.807,84	Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
13	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	3.544	3.827,15	Bima
24	BKSDA Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	502.112	480.851,16	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Sidenreng rapang, Sinjai, Soppeng, Wajo, Majene, Mamuju, Polewali Mandar
		Sulawesi barat			
15	BKSDA Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	389.247	114.113,87	Buol, Donggala Parigi, Moutong
16	BKSDA Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	64.510	135.142,01	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondooow Selatan
17		Gorontalo			
18	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	225.725	231.485,16	Konawe Utara
19	BKSDA Maluku	Maluku	197.802	191.198,20	Buru, Buru Selatan
		Maluku Utara			
20	BBKSDA Papua	Papua	1.767.713	1.826.488,62	Nabire, Merauke, Mappi, Boven Digul
21	BKSDA Papua Barat	Papua Barat	508.828	524.672,24	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, Tambrauw
	Jumlah Luasan target (Ha)		10.037.425	8.932.059,60	

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi tahun 2021, maka didapatkan total luasannya adalah 8.932.059,60 Ha.

Khusus untuk provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten dan Bali pada tahun 2021 tidak ditargetkan untuk melaksanakan kegiatan ini

**HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEHATI TINGGI
DI LUAR KAWASAN KONSERVASI**



IKK 2 : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

No	NAMA UNIT KEE	TIPOLOGI	LOKASI	UPT PENANGGUNG JAWAB
1	KEE Mangrove Ujung Pangkah	Lahan Basah	Kab Gresik, Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur
2	Karst Maros Pangkep	Karst	Kab Maros Pangkep, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan
3	Taman Kehati Bangka Tengah	Taman Kehati	Kab Bangka Tengah, Bangka Belitung	BBKSDA Riau
4	Taman Kehati Kiara Payung	Taman Kehati	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
5	Taman Kehati Kuningan	Taman Kehati	Kab Kuningan, Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
6	Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	Karst	Kab Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah
7	Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea Kelay	Koridor	Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur	BKSDA Kalimantan Timur
8	Koridor Gajah Lansekap Seblat	Koridor	Bengkulu	BKSDA Bengkulu
9	ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	ABKT	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalimantan Tengah
10	ABKT Rote Ndao	ABKT	Kab Rote Ndao, NTT	BBKSDA NTT
11	ABKT Pantai Kili kili	ABKT	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur

Melalui Nota Dinas Direktur BPPE kepada Sekditjen KSDAE nomor ND. 67/BPE2/ P2KE2/ KSA.4/5/2021 perihal Reviu Renstra Direktorat BPPE tahun 2020-2024, diusulkan perubahan pada lokasi target IKK 2.

Perubahan tersebut diusulkan karena terdapat unit KEE yang telah berubah fungsinya dan beberapa calon lokasi KEE yang belum ditetapkan sebagai KEE.

Dengan demikian, target lokasi IKK 2 tahun 2021 mengalami penyesuaian sebagaimana dirinci pada Tabel disamping kiri

III.1.2. Capaian Kinerja 5 tahunan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE 2020-2024, kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Program (IKP) Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) selama tahun 2020-2024. Dalam hal ini, Direktorat BPPE bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran kegiatan terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif

IKK 1 : Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Jika dilihat dari tabel di samping, sampai dengan tahun 2021, luasan kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi baru mencapai 15.595.351,56 Ha, sehingga masih kurang 27.404.648, 44 Ha untuk mencapai 43 Juta Ha. Target IKK tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Target IKK	8.000.000 Ha	10.000.000 Ha	10.000.000 Ha	10.000.000 Ha	5.000.000 Ha
Capaian	6.663.291,96 Ha	8.932.059,60 Ha	-	-	-
Persentase	83,29 %	89,32 %			
Kekurangan	27.404.648,44 Ha				

IKK 2 : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target IKK	11 Unit KEE	11 Unit KEE	11 Unit KEE	11 Unit KEE	11 Unit KEE
Capaian	11 Unit KEE	11 Unit KEE	-	-	-
Persentase	100 %	100 %	-	-	-
Kekurangan	33 Unit KEE				

Jika dilihat dari tabel di samping, sampai dengan tahun 2021, Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sudah mencapai 22 unit KEE, sehingga tersisa 33 unit KEE sampai dengan tahun 2024.

Target IKK tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024



III.1.3. Analisis Capaian terhadap Prioritas Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus secara nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6).

Terkait hal di atas, pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial yang dilakukan oleh Direktorat BPPE turut mendukung pencapaian Prioritas Nasional 6 (PN 6), yaitu dengan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi, serta kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE. Kedua kegiatan yang menjadi IKK Direktorat BPPE ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- untuk memetakan area-area di luar Kawasan Konservasi yang terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga dihasilkan data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi yang dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam melakukan upaya konservasi.
- untuk meningkatkan kualitas pengelolaan KEE oleh para pihak, sehingga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KEE tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial mendukung Prioritas Nasional 6 melalui kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan yang berdampak terhadap upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).



Karst Kab Pangkep, Sulawesi Selatan

III.1.4. Analisis Capaian Berbasis Output dan Outcome

III.1.4. 1. Analisis Capaian IKK 1 Berbasis Output

IKK 1 : Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi merupakan bagian dari kegiatan Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi adalah untuk memperoleh data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar Kawasan Konservasi yang terverifikasi.

Keluaran atau output dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di Luar Kawasan Konservasi.

Berdasarkan target tahun 2021, dilakukan inventarisasi dan verifikasi seluas 10 juta hektar yang diduga memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi yang berada di luar Kawasan konservasi yang dilakukan oleh 20 UPT BBKSDA/ BKSDA. Adapun hasilnya adalah 8.932.059,60 Ha (89,32 %)

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Penghematan anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Masih ada pemahaman yang kurang mengenai implementasi Perdirjen No. 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang petunjuk teknis inventarisasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB
- Tantangan dalam pengumpulan data dari stakeholder terkait kegiatan inventarisasi, mengingat areal inventarisasi dilaksanakan pada bentang alam lansekap yang beragam termasuk administrasi pengelolaannya (Hutan dan APL)

Agar target pada tahun berikutnya dapat dicapai maka diperlukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPT dan para pihak baik secara tatap muka maupun daring agar pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dapat lebih dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan optimal di tingkat tapak.
- Mengingat secara administratif area yang diinventarisasi bukan wilayah pengelolaan Ditjen KSDAE maka perlu dilakukan kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terutama Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat mitra KSDAE dan terutama pemilik/pengelolaan kawasan.
- Menghimpun data dan informasi terkait yang berasal dari instansi/ lembaga lain maupun mitra yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK ini

IKK 2 : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

Inisiasi perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) melalui skema KEE merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan kehati yang mampu meningkatkan kepedulian serta peran aktif masyarakat dan para pihak pada upaya perlindungan kehati, khususnya yang berada di luar Kawasan Konservasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka keberadaan KEE yang telah dibentuk perlu diperkuat upaya pengelolaannya melalui kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan KEE oleh para pihak setelah KEE dibentuk, sehingga kehati yang ada di dalamnya dapat dikelola secara partisipatif dan dimanfaatkan secara lestari, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KEE tersebut.

Berdasarkan target tahun 2021, dilakukan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE di 11 Unit KEE dan dikoordinir pelaksanaannya oleh 9 UPT BBKSDA/ BKSDA sesuai dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disusun.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada UPT BBKSDA/ BKSDA dapat berupa kegiatan perencanaan (penyusunan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan/ RAP, Rencana Kegiatan Pengelolaan/ RKP, dan Desain Dasar), maupun implementasi dari dokumen rencana pengelolaan yang telah disusun, yang meliputi kegiatan perlindungan KEE, pengawetan kehati, pemulihan ekosistem, dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada KEE

MANGROVE

PERAN UPT

Balai Besar KSDA Jawa Timur bertindak sebagai koordinator dan penyelenggara kegiatan, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dan DLH Kabupaten Gresik



JENIS KEGIATAN

1. Monitoring potensi KEE Ujungpangkah sebagai Situs Ramsar.
2. Pembinaan populasi kehati penting dan habitat ekosistem mangrove, melalui kegiatan pelepasliaran satwa (burung air dan buaya).
3. Penanaman bersama Gubernur Jawa Timur sebanyak 5000 batang mangrove.

Penanaman mangrove pada
4. peringatan WWD sebanyak 3000 batang.
5. Penanaman bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Gresik 3000 batang.

TINDAK LANJUT

1. Monitoring terhadap satwa yang dilepasliarkan
2. Pembuatan demplot keanekaragaman hayati mangrove yang tumbuh dalam KEE Ujungpangkah Desa Banyuurip (Program CSR PGN Saka)
3. Perlu ada peta realisasi pemulihan ekosistem
4. Perlu ada diversifikasi kegiatan pemanfaatan di KEE untuk mendorong pemanfaatan yang lebih dapat dirasakan oleh para pihak
5. Perlu diatur mekanisme/sistem pemanfaatan di KEE

KORIDOR HIDUPAN LIAR

KORIDOR GAJAH LANSEKAP SEBLAT, BENGKULU

JENIS KEGIATAN

Penyusunan RAP KEE
Bengkulu Tahun 2021-2024

Monitoring pengelolaan KEE

PERAN UPT

BKSDA Kalimantan Tengah
selaku koordinator teknis
berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan para
pihak dalam penyusunan
RAP KEE

TINDAK LANJUT

Finalisasi Dokumen
perencanaan KEE (RAP dan
RKP)

KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA KELAY, KAB BERAU DAN KUTAI TIMUR

JENIS KEGIATAN

Penyusunan RAP KEE
Bengkulu Tahun 2021-2024

Monitoring pengelolaan KEE

PERAN UPT

BKSDA Kalimantan Tengah
selaku koordinator teknis
berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan para
pihak dalam penyusunan RAP
KEE

TINDAK LANJUT

Finalisasi Dokumen
perencanaan KEE (RAP dan
RKP)

AREAL BERNILAI KEHATI TINGGI (ABKT)

ABKT PANTAI KILI KILI KAB. TRENGGALEK, JAWA TIMUR

JENIS KEGIATAN

Penyusunan Rencana Aksi
Pelindungan (RAP) KEE ABKT
Pantai Taman Kili-Kili

PERAN UPT

BBKSDA Jawa Timur selaku
koordinator teknis melakukan
koordinasi dengan pemerintah
kabupaten Trenggalek dan para

TINDAK LANJUT

Pengesahan RAP KEE oleh Dirjen
KSDAE

Penyusunan Rencana Kegiatan
Pelindungan (RKP) KEE

ABKT Kura kura Leher ular Rote Ndao, NTT

JENIS KEGIATAN

Penyusunan Rencana Aksi
Pelindungan (RAP) KEE ABKT Kura-
Kura Leher Ular Rote Ndao, NTT

PERAN UPT

BBKSDA NTT selaku koordinator
teknis berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan para pihak
lainnya dalam menyusun program
kegiatan untuk dituangkan kedalam
RAP KEE

TINDAK LANJUT

-Finalisasi RAP KEE oleh Dirjen KSDAE
-Pengesahan RAP KEE
Penyusunan Rencana Kegiatan
Pelindungan (RKP) KEE

ABKT DANAU BAGANTUNG KAB. PULPIS, KALIMANTAN TENGAH

JENIS KEGIATAN

1. Verifikasi Potensi Keanekaragaman
Hayati Danau Bagantung di Kab.
Sukamara.
2. Koordinasi dengan pemerintah
kabupaten Sukamara
3. Sosialisasi tentang Kawasan Ekosistem
Esensial (KEE) untuk meningkatkan
minat pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau dalam mengelola KEE.

PERAN UPT

BBKSDA Kalimantan Tengah selaku
koordinator teknis berkoordinasi dengan
pemkab untuk penyusunan renaksi

TINDAK LANJUT

1. Penyusunan RAP KEE
2. Melaksanakan monitoring TSL untuk
mendapatkan data yang akurat, khususnya
di sekitar Dusun Tanjung pusaka.

TAMAN KEHATI

TAMAN KEHATI KAB KUNINGAN JAWA BARAT

JENIS KEGIATAN

Penambahan koleksi jenis tanaman sejumlah 3.000 bibit .
Bantuan peningkatan sarana prasarana (pembuatan jogging track) sepanjang 67 meter.

PERAN UPT

Balai Besar KSDA Jawa Barat selaku koordinator teknis pengelolaan KEE di daerah termasuk Taman Kehati telah melakukan koordinasi dengan DLH Kabupaten Kuningan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.

TINDAK LANJUT

Kegiatan selanjutnya sebaiknya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan Taman Kehati Dukuh Dalem

TAMAN KEHATI PELAWAN KAB BANGKA TENGAH, BANGKA BELITUNG

JENIS KEGIATAN

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengenalan jenis flora di Taman Kehati.
Fasilitasi penguatan pengelolaan melalui penyediaan persemaian

PERAN UPT

Balai KSDA Sumatera Selatan sebagai koordinator teknis pengelolaan Taman Kehati di daerah telah melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas.

TINDAK LANJUT

Pemutakhiran dokumen RAP Taman Kehati Hutan Pelawan Kabupaten Bangka Tengah.

TAMAN KEHATI KIARA PAYUNG, KAB SUMEDANG, JAWA BARAT

JENIS KEGIATAN

Peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar Taman Kehati Kiarapayung terkait potensi tumbuhan obat
pembuatan minuman herbal serta tata cara produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)

PERAN UPT

Balai Besar KSDA Jawa Barat selaku koordinator teknis pengelolaan KEE di daerah termasuk Taman Kehati telah melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar Taman Kehati.

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati Kiarapayung agar disesuaikan dengan RAP yang telah disusun.
Perlu koordinasi dengan BBKSDA Jawa Barat dalam rangka implementasi kegiatan sesuai dengan RAP yang telah disusun.

KARST KAB BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH

PERAN UPT

Balai KSDA Sulawesi Tengah bertindak sebagai Pembina dalam pengelolaan KEE Karst Banggai Kepulauan dan berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.

TINDAK LANJUT

Perlu penguatan koordinasi antara Balai KSDA Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait implementasi pengelolaan KEE

Finalisasi dokumen RAP dan RKP KEE Karst Banggai Kepulauan sebagai acuan pengelolaan para pihak.

JENIS KEGIATAN

1. Pembahasan revisi Perda RTRW dan Review Peta RTRW 2021
2. Pengelolaan Taman Kehati Kokolomboi
3. Pemetaan jenis terancam punah/ jenis endemik Pulau Peling (Gagak Banggai dan Tarsius)
4. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat: pengembangan praktik pertanian organik dan tanaman hutan, pengembangan kawasan strategi pariwisata kabupaten/ kota
5. Program penghijauan hutan rakyat, melalui penanaman/ pengkayaan jenis bibit mahoni dan kemiri seluas 50 Ha.
6. Pemanfaatan jasa ekosistem KEE untuk kebutuhan air bersih rumah tangga, sarana pendidikan dan penelitian, ekowisata, aktivitas perkebunan/ pertanian; serta pemanfaatan dan pengembangan produk madu.

PERAN UPT

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Flora Fauna Internasional (FFI) bertindak sebagai penyelenggara sekaligus Narasumber dalam kegiatan tersebut

JENIS KEGIATAN

Penguatan Kapasitas Masyarakat di KEE Karst Maros Pangkep, berupa Pengembangan Praktek Pertanian Organik Ramah Lingkungan bagi Kelompok Tani (KT)/ Kelompok Wanita Tani (KWT)/ Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Salenrang dan Desa Tukamasea

KARST KAB MAROS PANGKEP SULAWESI SELATAN

TINDAK LANJUT

Kegiatan penguatan kapasitas selanjutnya dapat menyasar kelompok pemuda dalam yang berfokus pada pelatihan pengembangan ekowisata untuk mendukung karst Maros Pangkep sebagai destinasi wisata unggulan

Pemutakhiran kelembagaan pengelola KEE dan penetapan peta KEE Karst Maros Pangkep Finalisasi Dokumen perencanaan KEE (RAP dan RKP

Kegiatan pembinaan konservasi ekosistem esensial dalam rangka pencapaian target IKK 1 dan IKK 2

a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Direktorat BPPE selaku pembina dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) memiliki tugas dan fungsi dalam penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dapat mendukung implementasi pengelolaan KEE dan menjadi panduan bagi para pihak terkait. Dalam hal ini, selama TA 2021 Direktorat BPPE telah melaksanakan kegiatan penyusunan sejumlah draft pedoman/ panduan yaitu:

1. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
2. Pedoman Penentuan Areal Kajian Penyiapan serta Teknik Analisis Data dan Informasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Alam, dan Taman Buru.
3. Pedoman dalam registrasi kawasan hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Alam, dan Taman Buru yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
4. Draft Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah (Mangrove)
5. Draft Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Karst
6. Draft Pedoman Pengelolaan Taman Kehati
7. Draft Pedoman Pengelolaan Koridor Hidupan Liar
8. Draft Pedoman Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)



b. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Direktorat BPPE dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas para pihak dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan konservasi ekosistem esensial. Kegiatan bimbingan teknis/ koordinasi pengelolaan KEE dilaksanakan dalam bentuk koordinasi/ pertemuan, rapat pembahasan, dan perjalanan dinas ke UPT Ditjen KSDAE

Selain pertemuan secara langsung, bimbingan teknis juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi video conference. Kami memberikan kesempatan bagi UPT yang masih kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Bimbingan Teknis ini bisa terdiri dari banyak UPT, maupun khusus untuk membahas 1 UPT. dimana kegiatan ini dapat dihadiri Kepala Balai, Kepala Bidang, Kepala seksi juga petugas teknis yang melaksanakan kegiatan. Diharapkan dengan adanya bintek khusus ini mempermudah pelaksanaan kegiatan Inver



c. Koordinasi, Monitoring dan evaluasi



Koordinasi dilaksanakan dengan metode pertemuan daring dan tatap muka, serta kunjungan ke Balai Besar/Balai KSDA, Pemerintah Daerah, serta lokasi KEE yang menjadi target IKK pada tahun 2021.



Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan KEE merupakan salah satu tugas fungsi pembinaan ekosistem esensial yang dilaksanakan Direktorat BPPE dalam rangka mencapai pengelolaan yang optimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Mendapatkan data/ informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan KEE serta Inver yang dilaksanakan di tingkat tapak yang diselenggarakan oleh UPT KSDAE;
- Melakukan identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan
- Memberikan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terkait alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, efektif, dan efisien

d. Verifikasi Hasil Kegiatan

Kegiatan verifikasi hasil inventarisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar KSA, KPA, dan TB. Selain itu, kegiatan ini juga mengidentifikasi area-area di luar KSA, KPA, dan TB yang terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan mengidentifikasi lokasi dan luas area dalam rangka menyusun rancangan laporan akhir pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA, KPA dan TB.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 16 – 17 November 2021 bertempat di Hotel D'Anaya Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan/staf teknis dari 24 UPT Balai Besar/Balai KSDA, perwakilan dari Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat mitra Ditjen KSDAE. Kegiatan dilaksanakan dengan format pleno dan focus group discussions (FGD) yang terbagi ke dalam 4 kelompok, yang mewakili 5 region, yaitu region Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusra Maluku Papua.



e. Dukungan Kerjasama/ Komitmen Internasional terkait Lahan Basah dan Taman Kehati



tim Delri dalam pertemuan Excop 3



penanaman mangrove



peringatan WWD

Kegiatan dukungan kerjasama/ komitmen internasional terkait Lahan Basah dan Taman Kehati bertujuan untuk melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Direktorat BPPE terhadap seluruh komitmen internasional yang terkait dengan pengelolaan Lahan Basah dan Taman Kehati, khususnya terkait Konvensi Ramsar dan komitmen internasional terkait lainnya (CBD, SDGs, UNFCCC, dan lain-lain).

Dalam Konvensi Ramsar, Direktur BPPE bertindak sebagai National Focal Point Konvensi Ramsar di Indonesia yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan lahan basah dengan mengimplementasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil konvensi.

Selanjutnya, Direktorat BPPE memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil pengelolaan lahan basah sesuai implementasi Konvensi Ramsar dalam bentuk National Report yang berisikan implementasi pengelolaan lahan basah di Indonesia termasuk di wilayah KEE.

III.1.4. 2. Analisis Capaian Berbasis Outcome

OUTCOME

IKK 1 : Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi



Tumbuhnya kesadaran Pemerintah Daerah dan para pihak terkait keberadaan kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi sehingga upaya mainstreaming kawasan dengan kehati tinggi menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.



Terselenggaranya intervensi manajemen kawasan dengan kehati tinggi yang memberikan manfaat secara ekologis maupun ekonomi dan social budaya kepada masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengelolaan KEE



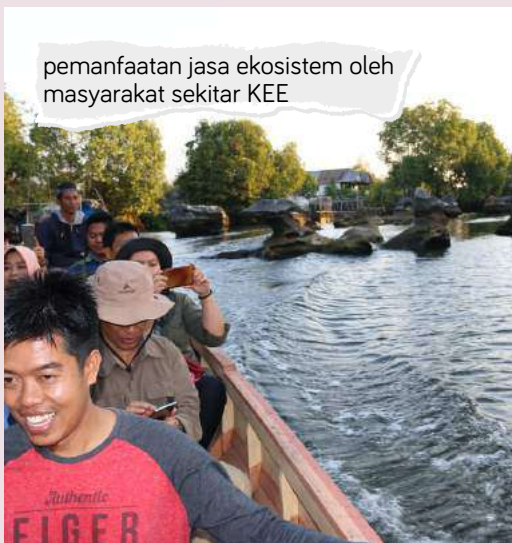
perlindungan satwa endemik/ langka dengan habitat yang baik



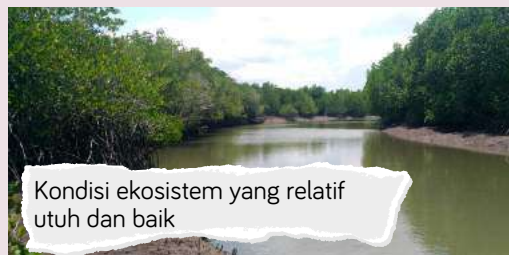
Tersedianya sumber bibit/ benih



pemanfaatan jasa ekosistem oleh masyarakat sekitar KEE



Kondisi ekosistem yang relatif utuh dan baik



Terdapatnya peran satwa penyerbuk dalam penambahan variasi genetik tanam



OUTCOME

IKK 2 : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya

III.1.4. 2. Realisasi Anggaran

No	Output	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Luas kawasan yang di inventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	480.675.000	479.738.628	99.81
2	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1.117.833.000	1.115.887.566	99.83
TOTAL		1.598.508.000	1.595.626.194	99.82

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem tahun 2021 untuk 2 (dua) kegiatan pokok Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 1.598.508.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.595.626.194,- atau 99,82%. Berdasarkan data penyerapan anggaran sebesar 99,82% dan capaian kinerja sebesar 94,66% sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPPE tahun 2021 berjalan efisien.

Pada aplikasi SMART output kinerja Direktorat BPPE berupa rekomendasi kebijakan, yaitu 1 rekomendasi kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi dan 2 rekomendasi kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya. Berdasarkan aplikasi kinerja SMART capaian kinerja Direktorat BPPE sebesar 100%.

Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memprioritaskan capaian kinerja pada target-target lokasi yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan anggaran seminimal mungkin (efisiensi anggaran) atau yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dukungan anggaran dan SDM dari Pemda, UPT KSDA atau mitra.

Pencapaian kinerja Direktorat BPPE pada tahun 2021 diharapkan menghasilkan beberapa outcome yang bermanfaat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) sebagai berikut :

- Meningkatnya luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi.
- Meningkatnya ruang perlindungan kehati berdasarkan basis data yang teregistrasi sebagai kawasan yang bernilai kehati tinggi.
- Terwujudnya pelestarian kehati melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pemanfaatan KEE.
- Meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar KEE melalui program pemberdayaan masyarakat.



ABKT Danau Mesangat-Suwi
Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur
Foto : BKSDA Kalimantan Timur

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2021 merupakan laporan hasil pencapaian kinerja tahun 2021 yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Laporan Kinerja Direktorat BPPE tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPPE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPPE melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah (1) Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi, dan (2) Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Sasaran tersebut dicapai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kegiatan yaitu (1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi dan (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya.

Nilai Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BPPE pada tahun 2021 sebesar 99,82 %. Pada tahun 2021, pemerintah masih melakukan penghematan anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19. Hal ini memberikan dampak pada pengurangan anggaran kegiatan di Direktorat BPPE. Tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengumpulan data dari stakeholder mengingat area kerja Dit BPPE berada pada wilayah hutan dan APL.

Upaya ke depan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan para pihak terutama pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat mitra KSDAE dan masyarakat terutama pemilik/pengelola kawasan. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak juga dapat mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi kehati di luar KSA, KPA dan TB.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
Jabatan : Plt. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2021
Plt. Direktur,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
Jabatan : Plt. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Desember 2021
Pihak Pertama,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I
Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

: Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
: Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
: 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	5424, PRJ 001 Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar
2	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	5424, PRJ 002 Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	11 Unit KEE

Kegiatan :

Anggaran :

(5424) Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Rp.1.598.508.000



Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Desember 2021
Plt. Direktur,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon 1
Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

: Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
: Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
: 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target W12
1	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai konektivitas hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai konektivitas hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	Pengumpulan dan pemeliharaan data dan informasi kawasan dengan nilai konektivitas hayati tinggi	Validasi (Ground Check) dan Verifikasi data kawasan dengan nilai konektivitas hayati tinggi	Validasi (Ground Check) dan Verifikasi data kawasan dengan nilai konektivitas hayati tinggi	Tersedianya data dan informasi kawasan yang telah diverifikasi menjadi wilayah konservasi nasional
2	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan Ekosistem Esensial yang efektif	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	- Fasilitas Pembentukan Pengelola KEE - Fasilitas Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE - Inventarisasi Sosekbud di KEE - Pemetaan KEE - Potensi Ekonomi Produktif Masyarakat di KEE	- Fasilitas Pembentukan Pengelola KEE - Fasilitas Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE - Inventarisasi Sosekbud di KEE - Pemetaan Potensi Ekonomi Produktif Masyarakat di KEE - Fasilitas/pemadangan dalam usaha ekonomi produktif - Fasilitas Pembentukan / Pembinaan Kelompok Pengelola KEE - Pembinaan pengembangan kapasitas pengelola KEE/ masyarakat	- Fasilitas Pembentukan Pengelola KEE - Fasilitas Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE - Fasilitas penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KEE - Masterplan pengembangan ekonomi produktif Kawasan Ekosistem Esensial - Fasilitas Pembentukan / Pembinaan Kelompok Pengelola KEE - Pembinaan pengembangan kapasitas pengelola KEE/ masyarakat	- Fasilitas Pembentukan Pengelola KEE - Fasilitas Penyusunan Rencana aksi Pengelolaan (RAP) KEE - Fasilitas penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KEE - Fasilitas pengembangan penyusunan Desain Daur Tanam Kelati Pengolahan Sisa Ransur Bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat pengelola KEE

Jakarta, Desember 2021

Plt. Direktur

Dr. Nandang Bihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabhakti, Blok VII Lantai 14
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 – Telp./Fax: 021 5746336

NOTA DINAS

Nomor: ND. 67/002-0202/ESA.4/5/2021

Yth : Sekretaris Ditjen KSDAE
Dari : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Hal : Reviu Renstra Direktorat BPEE Tahun 2020-2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 3 Mei 2021

Sehubungan dengan hasil reviu capaian kinerja Direktorat BPEE pada Indikator Kinerja Kegiatan Kawasan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektifitasnya tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian pada target Renstra Direktorat BPEE Tahun 2020-2024. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:

1. Terdapat KEE yang telah berubah fungsi dan belum ditetapkan sebagai KEE :
 - a. Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Padang Pariaman telah beralih fungsi menjadi jalan tol sehingga diganti dengan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunung Kidul.
 - b. Peningkatan efektifitas pengelolaan KEE di Ekosistem Karst Gunung Kidul tidak dapat dilaksanakan karena ekosistem karst tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di bawah kewenangan Badan Geologi Kementerian ESDM sehingga diganti dengan Karst Maros Pangkep.
 - c. Peningkatan efektifitas pengelolaan KEE di Ekosistem Karst Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat dilaksanakan karena belum ditetapkan sebagai KEE sehingga diganti dengan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Blitar dan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
2. Beberapa lokasi KEE lainnya disesuaikan tata waktu pelaksanaannya sesuai dengan ketersediaan anggaran di UPT.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ir. Asep Sugiharta, M.Sc
NIP. 19640229 199003 1 001

Tembusan Kepada Yth:
Direktur Jenderal KSDAE (sebagai laporan)



Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2021